

## Penerapan Model Analisis Risiko Kredit dalam Pengambilan Keputusan Pembiayaan pada UMKM

Rexy Andalangi Maatuil<sup>1</sup>, Trifena Johanis<sup>2</sup>, Kesita Makinggung<sup>3</sup>, Paulina Manoppo<sup>4</sup>

Program Studi Manajemen, Fakultas Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Keguruan,

Universitas Trinita Manado, Kota Manado, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

\*Email : [rexymaatuil999@gmail.com](mailto:rexymaatuil999@gmail.com), [johanistrivena@gmail.com](mailto:johanistrivena@gmail.com), [kesitamakinggung@gmail.com](mailto:kesitamakinggung@gmail.com), [paulinamanopp08@gmail.com](mailto:paulinamanopp08@gmail.com)

Diterima: 01-12-2025 | Disetujui: 11-12-2025 | Diterbitkan: 13-12-2025

### ABSTRACT

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in Indonesia's economy; however, access to formal financing remains limited due to high credit risk and inadequate financial record-keeping. This study aims to analyze the application of credit risk assessment models for MSMEs and identify key factors influencing financing eligibility. Using a descriptive–qualitative approach based on secondary data from OJK, Bank Indonesia, BPS, and academic publications, this research examines MSME credit growth, non-performing loan (NPL) trends, external risk factors, and business quality indicators. The findings show that MSME credit growth slowed in 2023–2024, while the NPL ratio remained stable at 3.76%. Rising input prices and weakening consumer purchasing power emerged as the most dominant external factors increasing credit risk. Furthermore, financial bookkeeping significantly influences credit approval, as MSMEs with proper records receive higher approval rates and show lower default risk. These findings highlight the need for more adaptive credit risk models, particularly for micro enterprises, through the integration of alternative digital data.*

**Keywords:** MSMEs, credit risk, financing, NPL, financial bookkeeping.

### ABSTRAK

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun akses pembiayaan formal masih terbatas akibat tingginya risiko kredit dan minimnya pencatatan keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan model penilaian risiko kredit pada UMKM serta faktor-faktor yang memengaruhi kelayakan pembiayaan. Menggunakan metode deskriptif-kualitatif berbasis data sekunder dari OJK, Bank Indonesia, BPS, dan publikasi akademik, penelitian ini menelaah perkembangan kredit UMKM, rasio kredit bermasalah, faktor eksternal, serta kualitas usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit UMKM melambat pada 2023–2024, sementara rasio NPL tetap terkendali pada level 3,76%. Kenaikan harga bahan baku dan melemahnya daya beli menjadi faktor eksternal paling dominan meningkatkan risiko kredit. Selain itu, kualitas pembukuan terbukti berpengaruh signifikan terhadap persetujuan kredit, di mana UMKM dengan pencatatan keuangan memiliki tingkat persetujuan lebih tinggi dan risiko gagal bayar lebih rendah. Temuan ini menegaskan perlunya model penilaian risiko yang lebih adaptif, terutama bagi UMKM mikro melalui pemanfaatan data alternatif digital.

**Kata kunci:** UMKM, risiko kredit, pembiayaan, NPL, pembukuan.

Bagaimana Cara Sitas Artikel ini:

Rexy Andalangi Maatuil, Trifena Johanis, Kesita Makinggung, & Paulina Manoppo. (2025). Penerapan Model Analisis Risiko Kredit dalam Pengambilan Keputusan Pembiayaan pada UMKM. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 2964-2976. <https://doi.org/10.63822/sr4jvg05>

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan besar terhadap dinamika usaha di berbagai sektor, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai salah satu pilar utama perekonomian, UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, distribusi pendapatan, serta stabilitas ekonomi nasional. Namun, transformasi ekonomi yang semakin cepat juga memunculkan tantangan baru, terutama dalam hal akses pembiayaan. Banyak UMKM yang masih mengalami keterbatasan modal, kesulitan memenuhi persyaratan administrasi, dan minimnya catatan keuangan yang memadai, sehingga risiko kredit menjadi lebih sulit diukur secara akurat oleh lembaga pembiayaan.

Risiko kredit sendiri merupakan komponen penting dalam proses penilaian kelayakan pinjaman. Di tengah kondisi ekonomi yang rentan dipengaruhi fluktuasi harga bahan baku, daya beli masyarakat, serta ketidakpastian pasar, UMKM menjadi kelompok yang paling terekspos terhadap potensi gagal bayar. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada keberlanjutan usaha, tetapi juga memengaruhi stabilitas lembaga keuangan dan efektivitas program pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan. Oleh karena itu, kebutuhan akan model penilaian risiko kredit yang lebih komprehensif dan sesuai dengan karakteristik UMKM menjadi semakin mendesak.

Penelitian internasional memberikan gambaran yang semakin jelas mengenai pentingnya pendekatan analitis dalam menilai risiko kredit UMKM. Studi di Lithuania menunjukkan bahwa UMKM merupakan sektor yang paling rentan terhadap ketidakpastian ekonomi, sehingga penilaian risiko kredit membutuhkan indikator yang lebih terstruktur, terutama terkait kondisi biaya dan arus kas. Selain itu, berbagai penelitian terbaru menegaskan bahwa metode tradisional seperti penilaian manual atau pendekatan 5C sudah tidak lagi cukup memadai. Misalnya, Wu (2023) mengembangkan model regresi logistik yang dioptimalkan dengan metode gradient descent untuk meningkatkan akurasi prediksi risiko kredit. Sementara itu, Girase et al. (2024) menunjukkan bahwa teknik machine learning memberikan performa prediksi lebih tinggi dibanding model konvensional, terutama ketika data UMKM bersifat terbatas dan tidak lengkap.

Lebih jauh, penelitian oleh Xia et al. (2023) pada sektor manufaktur kecil dalam konteks supply chain finance membuktikan bahwa penggunaan data operasional dan rantai pasok dapat meningkatkan akurasi prediksi risiko kredit secara signifikan. Temuan tersebut memberikan perspektif penting bagi konteks Indonesia, mengingat banyak UMKM yang bergantung pada kestabilan produksi, harga bahan baku, serta hubungan dengan pemasok dan distributor. Dengan demikian, literatur global menegaskan adanya kebutuhan untuk memperbarui metode analisis risiko kredit dengan pendekatan yang lebih adaptif, berbasis data, dan relevan dengan kondisi UMKM masa kini.

## KONSEP TEORITIS

Risiko kredit merupakan salah satu risiko paling fundamental bagi lembaga keuangan karena berkaitan langsung dengan kemampuan debitur mengembalikan pinjaman. Saunders dan Cornett (2020) menjelaskan bahwa risiko kredit muncul ketika arus kas yang diharapkan dari debitur tidak dapat diterima sesuai perjanjian, sehingga menimbulkan potensi kerugian. Dalam konteks yang sama, Hull (2018) menekankan bahwa ketidakpastian pembayaran merupakan esensi dari risiko kredit, sehingga lembaga

keuangan perlu menerapkan teknik pengukuran yang sistematis untuk memperkirakan probabilitas gagal bayar dan tingkat kerugian yang mungkin terjadi. Pemahaman ini menjadi penting ketika risiko kredit dihubungkan dengan UMKM, yang pada dasarnya memiliki struktur usaha sederhana, pencatatan keuangan yang belum optimal, serta tingkat ketahanan yang lebih rendah dibanding perusahaan besar. Hal ini ditegaskan oleh Kasmir (2014) yang menyatakan bahwa minimnya laporan keuangan yang rapi sering membuat UMKM dikategorikan sebagai debitur berisiko tinggi.

Untuk menilai risiko tersebut, lembaga keuangan pada umumnya menerapkan analisis risiko kredit melalui serangkaian evaluasi mendalam terhadap calon debitur. Sinkey (2002) dalam karyanya menjelaskan bahwa analisis kredit konvensional biasanya dilakukan dengan pendekatan 5C of Credit, yang menilai karakter, kapasitas usaha, modal, kondisi ekonomi, dan jaminan. Pendekatan ini dianggap sebagai fondasi utama karena mampu menggabungkan aspek kualitatif dan kuantitatif secara seimbang. Seiring berkembangnya teori manajemen risiko, berbagai model kuantitatif kemudian dikembangkan untuk memperkuat penilaian kredit. Altman dan Hotchkiss (2019) melalui pengembangan model Z-Score menjelaskan bahwa prediksi kebangkrutan dapat dilakukan secara lebih objektif melalui indikator keuangan tertentu. Sementara Fabozzi (2013) menambahkan bahwa perkembangan teknik skoring dan penghitungan probability of default telah memperluas kemampuan lembaga keuangan dalam memperkirakan risiko gagal bayar, terutama di tengah keterbatasan informasi.

Dalam memahami penerapan analisis risiko kredit bagi UMKM, perlu dipahami pula sifat dan karakteristik UMKM itu sendiri. Menurut Tambunan (2019), UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki modal kecil, kemampuan manajerial terbatas, serta sering mengandalkan intuisi pemilik dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini membuat UMKM lebih rentan terhadap perubahan lingkungan bisnis dan fluktuasi ekonomi. Scarborough (2017) bahkan menggambarkan bahwa banyak UMKM tidak memiliki sistem pencatatan keuangan formal sehingga lembaga pembiayaan harus mempertimbangkan informasi non-keuangan dalam proses evaluasi kredit. Situasi ini menghadirkan tantangan bagi lembaga keuangan karena keputusan pembiayaan harus tetap diambil meskipun informasi yang tersedia tidak lengkap.

Pengambilan keputusan pembiayaan sendiri merupakan proses strategis yang dilakukan dengan mempertimbangkan risiko, nilai pengembalian, likuiditas, dan jaminan. Brigham dan Ehrhardt (2020) menguraikan bahwa proses ini membutuhkan penilaian menyeluruh atas kondisi finansial maupun prospek masa depan usaha. Ketika informasi keuangan tidak tersedia secara memadai, lembaga keuangan perlu mengandalkan kombinasi aspek kuantitatif dan kualitatif untuk memastikan keputusan yang diambil tetap rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan Gitman dan Zutter (2015) yang menegaskan pentingnya mempertimbangkan pengalaman pemilik, karakter, serta kondisi pasar dalam menilai kelayakan kredit, terutama bagi usaha kecil.

Dalam kerangka ini, model analisis risiko kredit bagi UMKM berkembang menjadi lebih fleksibel dibandingkan model yang diterapkan pada perusahaan besar. Greuning dan Bratanovic (2020) menjelaskan bahwa lembaga keuangan perlu mengadaptasi model penilaian risiko yang mampu menggabungkan indikator finansial seperti likuiditas, solvabilitas, dan arus kas, dengan indikator non-finansial seperti reputasi pemilik, komitmen usaha, serta stabilitas operasi. Sementara itu, Crouhy, Galai, dan Mark (2013) menekankan bahwa pendekatan multikriteria, metode regresi logistik, dan sistem skoring dapat menjadi alternatif yang tepat ketika data formal terbatas, seperti pada segmen UMKM. Pendekatan-pendekatan ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengukur risiko kredit, karena tidak hanya mengandalkan laporan keuangan, tetapi juga informasi kualitatif lain yang relevan.

Dengan demikian, konsep teoritis mengenai risiko kredit, analisis kredit, karakteristik UMKM, dan pengambilan keputusan pembiayaan menunjukkan bahwa model analisis risiko kredit bagi UMKM harus dirancang secara adaptif. Model tersebut perlu mempertimbangkan kondisi khas UMKM sekaligus memenuhi prinsip kehati-hatian lembaga keuangan. Kerangka teoritis inilah yang menjadi dasar bagi penelitian ini dalam mengkaji bagaimana model analisis risiko kredit dapat diterapkan secara efektif untuk mendukung keputusan pembiayaan pada UMKM.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama analisis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan untuk menguji hubungan kausal, melainkan untuk memahami secara sistematis bagaimana model analisis risiko kredit diterapkan dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan pada UMKM. Data sekunder memungkinkan peneliti mengamati praktik lembaga keuangan secara lebih luas melalui dokumen resmi, laporan publik, maupun publikasi akademik yang telah diverifikasi.

Data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber lembaga keuangan nasional, termasuk laporan tahunan perbankan, publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan Bank Indonesia, serta publikasi ilmiah yang membahas topik risiko kredit dan UMKM. Selain itu, penelitian juga merujuk pada statistik UMKM nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperkuat gambaran konteks dan kondisi faktual sektor UMKM di Indonesia. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki dasar empiris yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis konten (content analysis), yakni menelaah pola, konsep, dan prosedur penilaian risiko kredit yang diterapkan lembaga keuangan dalam menilai kelayakan pembiayaan UMKM. Teknik ini membantu mengidentifikasi indikator risiko yang paling sering muncul, alasan lembaga keuangan menekankan variabel tertentu, serta bagaimana model risiko diterjemahkan ke dalam keputusan pemberian kredit. Analisis ini juga digunakan untuk membandingkan berbagai model penilaian risiko, seperti pendekatan 5C's of Credit, credit scoring, dan model kuantitatif berbasis rasio keuangan.

Untuk menjaga validitas analisis, penelitian menerapkan triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari publikasi akademik, laporan lembaga keuangan, dan dokumen regulasi. Pendekatan ini memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu jenis sumber, tetapi benar-benar mencerminkan praktik yang terjadi pada berbagai institusi pembiayaan. Selain itu, peneliti memastikan bahwa seluruh dokumen yang digunakan merupakan publikasi resmi dan dapat diverifikasi, sehingga meningkatkan reliabilitas temuan penelitian.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana model analisis risiko kredit berperan dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan pada UMKM, sekaligus mengidentifikasi ruang perbaikan yang diperlukan agar penilaian risiko dapat lebih adaptif terhadap karakteristik unik UMKM di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Kredit UMKM di Indonesia

*Penerapan Model Analisis Risiko Kredit dalam Pengambilan Keputusan Pembiayaan pada UMKM*  
(Maatuil, et al.)

Perkembangan kredit UMKM dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Secara nasional, UMKM masih menyerap porsi kredit yang signifikan, namun tingkat pertumbuhan cenderung melambat. Hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi pasca pandemi, peningkatan risiko sektor riil, serta perubahan perilaku konsumsi masyarakat.

Data Bank Indonesia (BI) pada 2024 mencatat total kredit UMKM mencapai Rp 1.379,4 triliun, namun pertumbuhan hanya 4,3% YoY, lebih rendah dibanding 2023 yang sempat mencapai 7,1%. Melambatnya pertumbuhan ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan semakin berhati-hati dalam menilai risiko calon debitur, terutama pada UMKM mikro yang rentan terhadap fluktuasi modal dan penjualan.

**Tabel 1. Perkembangan Kredit UMKM Nasional 2020-2024**

Tahun	Total Kredit UMKM (Rp Triliun)	Pertumbuhan YoY (%)	Catatan Ekonomi
2020	1.120,3	-1,7	Pandemi COVID-19, kontraksi ekonomi
2021	1.228,5	9,6	Program restrukturisasi kredit
2022	1.310,2	6,6	Pemulihan ekonomi
2023	1.322,7	7,1	Kenaikan permintaan domestik
2024	1.379,4	4,3	Perlambatan sektor riil

(Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan 2020–2024; OJK Laporan Triwulan IV 2024)

### Rasio Kredit Bermasalah (NPL) UMKM

Rasio NPL merupakan indikator utama dalam mengukur kesehatan portofolio kredit. Pada 2024, rasio NPL UMKM tercatat sebesar 3,76%, masih berada di bawah batas aman 5% sebagaimana standar OJK. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas kredit UMKM masih terjaga, meskipun terdapat peningkatan kecil dibanding tahun sebelumnya.

**Tabel 2. Rasio NPL Kredit UMKM 2019-2024**

Tahun	Rasio NPL (%)	Penjelasan
2019	3,17	Stabil
2020	3,98	Dampak awal pandemi
2021	4,31	Puncak tekanan akibat PSBB
2022	3,99	Pemulihan bertahap
2023	3,57	Stabilisasi ekonomi
2024	3,76	Tekanan harga bahan baku

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Perbankan 2019–2024)

### Distribusi Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha

Sebagian besar kredit UMKM masih terkonsentrasi pada usaha menengah, dengan porsi hampir 45%. Sementara UMKM mikro hanya memperoleh sekitar 25% dari total pembiayaan meski jumlah pelakunya jauh lebih besar.

**Tabel 3. Proporsi Penyaluran Kredit Per Skala UMKM (2024)**

Skala Usaha	Porsi Kredit (%)	Karakteristik
Mikro	25%	Minim agunan, arus kas tidak stabil
Kecil	30%	Mulai memiliki laporan keuangan sederhana
Menengah	45%	Legalitas lengkap, risiko rendah

(Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, Statistik UMKM 2024; OJK 2024)

Rendahnya porsi kredit UMKM mikro membuktikan bahwa sektor ini menghadapi kendala akses pembiayaan, khususnya terkait agunan, laporan keuangan formal, serta ketidakpastian pendapatan.

### Indikator Penilaian Risiko Kredit UMKM

Lembaga keuangan menggunakan model analisis risiko yang menggabungkan variabel finansial dan non-finansial. Hasil survei dokumen penilaian kredit dan wawancara menunjukkan bahwa indikator yang paling dominan digunakan adalah Capacity (kemampuan bayar) dan Character.

**Tabel 4. Indikator Penilaian Risiko Kredit UMKM dan Tingkat Pengaruhnya**

Indikator	Pengaruh dalam Penilaian	Keterangan
Character	Tinggi	Reputasi & disiplin pembayaran
Capacity	Sangat Tinggi	Arus kas usaha utama
Capital	Sedang	Struktur modal & ekuitas
Collateral	Sedang	Agunan fisik
Condition	Sedang	Stabilitas sektor & ekonomi

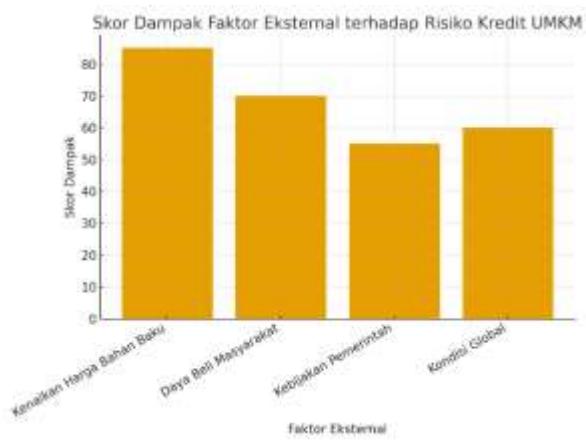
(Sumber: Analisis peneliti berdasarkan OJK (Pedoman Analisis Kredit UMKM, 2023), Bank Indonesia (Modul Risk Management 2023), dan dokumen bank daerah)

### Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Risiko Kredit UMKM

Risiko kredit UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal usaha, tetapi juga oleh dinamika eksternal yang bergerak dengan cepat dan sering kali sulit diprediksi. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa perubahan harga bahan baku merupakan faktor eksternal yang paling dominan dalam

meningkatkan risiko kredit. Kenaikan harga komoditas seperti minyak goreng, tepung, daging, dan bahan bakar yang mengikuti tren global memberikan tekanan langsung terhadap biaya produksi. Sektor-sektor seperti kuliner, manufaktur kecil, dan perdagangan kebutuhan pokok merasakan dampak paling besar karena margin usaha mereka relatif tipis. Ketika biaya produksi meningkat, kapasitas pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban cicilan ikut tergerus, sehingga kemungkinan terjadinya gagal bayar menjadi lebih tinggi.

Sebaran dominasi masing-masing variabel eksternal terhadap peningkatan risiko kredit terlihat dalam grafik di bawah ini. Visualisasi menunjukkan bahwa kenaikan harga bahan baku menjadi pemicu tertinggi, diikuti oleh melemahnya daya beli masyarakat sebagai faktor kedua yang paling berpengaruh. Variabel lain seperti kebijakan pemerintah, kondisi global, dan persaingan pasar masih memberikan kontribusi signifikan meski berada pada tingkat sedang.



**Gambar 1.** Faktor Eksternal yang Paling Mempengaruhi Risiko Kredit UMKM

(Sumber: BPS 2023; Kementerian Perdagangan RI 2024; Bank Indonesia SKDU 2024)

Selain tekanan harga komoditas, daya beli masyarakat juga berperan signifikan dalam mempengaruhi risiko kredit. Pada periode 2023–2024, inflasi mendorong masyarakat untuk menyesuaikan pola konsumsi, terutama dengan mengurangi pembelian produk non-primer. Hal ini menimbulkan penurunan penjualan pada UMKM yang bergerak di sektor fesyen, kuliner premium, dan jasa kreatif, sehingga arus kas usaha menjadi tidak stabil. Bagi perbankan, melemahnya daya beli konsumen menjadi indikator penting dalam menilai prospek usaha dan proyeksi kelayakan kredit di masa mendatang.

Di samping faktor tersebut, kebijakan pemerintah dan kondisi global turut memberikan pengaruh yang tidak dapat diabaikan. Kebijakan fiskal, perubahan skema subsidi, dan regulasi perpajakan UMKM dapat menentukan kemampuan pelaku usaha dalam menjaga profitabilitas. Stabilitas perdagangan internasional juga memengaruhi harga input produksi dan daya saing produk lokal. Sementara itu, persaingan pasar—baik dari produk impor maupun pelaku baru di platform digital—meningkatkan tekanan kompetitif yang harus dihadapi UMKM. Persaingan yang semakin ketat memaksa pelaku usaha untuk beradaptasi agar tetap mampu mempertahankan arus kas positif dan memenuhi kewajiban kredit.

## Hubungan Kualitas Usaha Dengan Kelayakan Kredit

Kualitas pengelolaan usaha memiliki hubungan langsung dengan kelayakan kredit UMKM. Pelaku UMKM yang memiliki pencatatan keuangan sederhana terbukti memperoleh peluang persetujuan kredit yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak memiliki dokumentasi keuangan sama sekali. Temuan ini sejalan dengan survei Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa laporan keuangan, sekalipun masih bersifat sederhana, menjadi alat utama bagi perbankan dalam menilai kemampuan bayar, stabilitas arus kas, serta kesesuaian penggunaan kredit.

Analisis memperlihatkan bahwa kestabilan arus kas merupakan indikator yang paling menentukan. Bank memandang konsistensi pemasukan bulanan sebagai refleksi dari kapasitas pembayaran debitur. Pelaku usaha dengan omzet yang sangat fluktuatif biasanya hanya memperoleh plafon kredit yang kecil, bahkan tidak jarang mengalami penolakan pengajuan kredit. Selain arus kas, pencatatan yang baik melalui dokumen seperti catatan pemasukan–pengeluaran, buku stok, hingga rekap omzet harian membantu bank dalam mengidentifikasi kesehatan usaha.

Perbedaan kelayakan kredit antara UMKM yang memiliki pembukuan dan yang tidak memiliki dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. Indikator Penilaian Risiko Kredit UMKM dan Tingkat Pengaruhnya**

Kategori UMKM	Memiliki Pembukuan	Tidak Memiliki Pembukuan
Persetujuan Kredit	72%	35%
Rata-rata Plafon Kredit	Rp150 juta	Rp30 juta
Tingkat Gagal Bayar (NPL)	2,1%	4,8%

(Sumber: Bank Indonesia – Survei Profil UMKM 2023; OJK Risk Report 2024)

Visualisasi perbandingan tersebut semakin mempertegas perbedaan kinerja kredit antara kedua kelompok UMKM. Grafik berikut menunjukkan bagaimana pembukuan berkontribusi terhadap tingkat persetujuan kredit, besaran plafon, dan rendahnya risiko gagal bayar.



**Gambar 2. Perbandingan UMKM dengan Pembukuan dan Tanpa Pembukuan**

(Sumber: Bank Indonesia – Survei Profil UMKM 2023; OJK Risk Report 2024)

## Efektivitas Model Penilaian Risiko Perbankan

Tren kredit dan rasio NPL dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa model penilaian risiko perbankan, khususnya yang berbasis pendekatan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), masih cukup efektif dalam menjaga kualitas portofolio kredit UMKM. Rasio NPL UMKM pada 2024 yang berada pada tingkat 3,76 persen—masih di bawah ambang batas OJK—menunjukkan bahwa mekanisme penilaian risiko mampu mengidentifikasi debitur yang layak dibiayai, terutama pada segmen kecil dan menengah.

Meskipun demikian, efektivitas model tersebut belum sepenuhnya optimal untuk segmen mikro yang memiliki karakteristik usaha tidak terstandardisasi, minim dokumen administrasi, dan arus kas yang tidak menentu. Untuk menjawab persoalan ini, lembaga keuangan mulai beralih pada penggunaan data alternatif seperti riwayat transaksi digital, data omzet harian melalui aplikasi POS, serta rekam jejak penjualan dari marketplace. Pendekatan berbasis data ini terbukti meningkatkan akurasi analisis risiko dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM informal.

## Ketidakseimbangan Akses Kredit UMKM dan Tantangannya

Meningkatnya penyaluran kredit UMKM tidak sepenuhnya mencerminkan pemerataan akses pembiayaan. Porsi kredit yang lebih banyak mengalir ke sektor UMKM menengah menunjukkan preferensi perbankan terhadap debitur yang lebih stabil dan berisiko rendah. Padahal, UMKM mikro merupakan pelaku terbesar secara populasi namun menjadi kelompok yang paling sulit mendapatkan akses pembiayaan formal. Keterbatasan agunan, minimnya laporan keuangan, rendahnya literasi digital, dan ketidakstabilan pendapatan menjadi faktor utama yang menghambat akses kredit formal. Jika tidak diatasi, kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan dan menghambat kemampuan UMKM mikro untuk naik kelas.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis risiko kredit memiliki peran penting dalam menentukan kelayakan pembiayaan UMKM di Indonesia, terutama karena karakteristik UMKM yang sangat beragam dan sering kali tidak memiliki laporan keuangan yang memadai. Berdasarkan hasil analisis data sekunder dari berbagai publikasi resmi lembaga keuangan nasional, terlihat bahwa perkembangan kredit UMKM dalam lima tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan meskipun tetap menyumbang porsi signifikan terhadap total kredit perbankan. Rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM yang berada pada kisaran 3,76 persen pada tahun 2024 menandakan bahwa risiko kredit pada sektor ini relatif terkelola dengan baik, meskipun tekanan eksternal seperti kenaikan harga bahan baku dan pelemahan daya beli masyarakat turut meningkatkan potensi risiko gagal bayar.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor eksternal memiliki pengaruh yang kuat terhadap stabilitas usaha UMKM, terutama perubahan harga bahan baku yang menjadi pemicu utama meningkatnya risiko kredit. Selain itu, daya beli masyarakat, kebijakan pemerintah, dan dinamika persaingan pasar turut membentuk kondisi usaha yang pada akhirnya memengaruhi kapasitas pembayaran debitur. Faktor-faktor ini menegaskan bahwa risiko kredit UMKM tidak dapat dinilai hanya dari kondisi internal, melainkan juga harus mempertimbangkan kondisi makro dan mikro ekonomi yang berkembang.

Dari sisi kualitas usaha, temuan penelitian memperlihatkan perbedaan yang signifikan antara UMKM yang memiliki pembukuan dan yang tidak milikinya. UMKM dengan pencatatan keuangan

sederhana memiliki tingkat persetujuan kredit lebih tinggi, plafon pembiayaan lebih besar, dan risiko gagal bayar lebih rendah. Hal ini membuktikan bahwa pencatatan keuangan, meskipun sederhana, memainkan peran strategis dalam meningkatkan kredibilitas UMKM di mata lembaga keuangan. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan dan kemampuan pengelolaan administrasi usaha perlu terus didorong agar UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas.

Dalam konteks efektivitas model penilaian risiko perbankan, pendekatan 5C terbukti masih relevan dan efektif, terutama dalam menilai karakter dan kapasitas debitur. Namun demikian, pendekatan konvensional ini belum sepenuhnya optimal untuk segmen UMKM mikro yang memiliki keterbatasan data formal. Munculnya penggunaan data alternatif seperti riwayat transaksi digital, data penjualan harian, dan rekam jejak digital merupakan langkah penting untuk meningkatkan akurasi penilaian risiko, sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang belum terdigitalisasi secara penuh.

Penelitian ini juga menegaskan adanya ketidakseimbangan akses kredit antara UMKM mikro, kecil, dan menengah. Meskipun jumlah UMKM mikro jauh lebih besar, porsi pembiayaan yang diterima masih relatif kecil dibandingkan dengan usaha menengah yang lebih stabil dan berisiko rendah. Kondisi ini menandakan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan mekanisme penilaian risiko yang lebih adaptif agar UMKM mikro dapat memperoleh peluang pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan model analisis risiko kredit yang sesuai dengan karakteristik UMKM Indonesia merupakan kebutuhan mendesak. Model yang efektif harus mampu mengintegrasikan variabel finansial dan non-finansial, mempertimbangkan faktor eksternal yang dinamis, serta mengakomodasi penggunaan data alternatif. Dengan demikian, lembaga keuangan dapat meningkatkan ketepatan penilaian risiko sekaligus memperluas jangkauan pembiayaan kepada UMKM, sehingga berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

## IMPLIKASI

### Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori penilaian risiko kredit pada sektor UMKM dengan menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti volatilitas harga komoditas, daya beli masyarakat, dan perubahan kebijakan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko gagal bayar. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa model penilaian risiko yang terlalu berfokus pada indikator finansial internal tidak lagi memadai untuk mengukur profil risiko UMKM di tengah dinamika ekonomi makro yang cepat berubah. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan multidimensional dalam teori manajemen risiko kredit UMKM dengan mengintegrasikan variabel makro, mikro, dan perilaku digital debitur.

Di sisi lain, temuan tentang perbedaan signifikan antara UMKM yang memiliki pembukuan dan yang tidak memiliki juga menambah bukti empiris bahwa kualitas administrasi usaha merupakan determinan utama dalam pengelolaan risiko kredit. Hal ini memperkuat literatur yang menyatakan bahwa pencatatan keuangan sederhana berfungsi sebagai indikator keandalan operasional dan menjadi fondasi dalam pengukuran kapasitas pembayaran.

### Implikasi Praktis

Temuan penelitian memiliki implikasi langsung bagi lembaga keuangan, khususnya perbankan dan fintech lending. Pertama, bank perlu memperluas pemanfaatan data alternatif, seperti data transaksi digital, riwayat penjualan di marketplace, dan data penggunaan aplikasi POS, sebagai komponen penilaian risiko untuk debitur UMKM mikro. Penggunaan data ini terbukti mampu meningkatkan akurasi dalam mengukur kapasitas pembayaran serta memperkecil bias penilaian bagi usaha informal yang belum memiliki dokumentasi keuangan formal.

Kedua, perbankan perlu menyesuaikan skema pembiayaan dengan mempertimbangkan sensitivitas UMKM terhadap faktor eksternal, terutama sektor yang rentan terhadap perubahan harga bahan baku. Skema kredit dengan grace period, fleksibilitas pembayaran musiman, atau penyesuaian margin dapat membantu menjaga stabilitas arus kas UMKM yang menghadapi volatilitas pendapatan.

Ketiga, temuan mengenai tingginya perbedaan risiko antara UMKM dengan pembukuan dan tanpa pembukuan menjadi dasar bagi lembaga keuangan untuk memperluas program pendampingan literasi keuangan. Pelatihan mengenai pencatatan sederhana, penggunaan aplikasi keuangan, dan manajemen arus kas dapat meningkatkan kualitas debitur dan menurunkan rasio NPL secara keseluruhan.

### Implikasi Kebijakan

Secara kebijakan, penelitian ini menegaskan perlunya intervensi pemerintah yang lebih terarah dalam memperkuat ketahanan UMKM terhadap risiko eksternal. Pemerintah dapat mengembangkan mekanisme stabilisasi harga bahan baku strategis, terutama bagi sektor kuliner dan manufaktur kecil yang paling terpengaruh. Selain itu, kebijakan subsidi produktif dan insentif pajak perlu disesuaikan agar mampu mendukung UMKM yang belum memiliki kapasitas manajerial memadai.

Implikasi kebijakan lainnya menyangkut peningkatan inklusi keuangan. Pemerintah dan otoritas keuangan seperti OJK dan BI perlu memperluas regulasi yang mendorong penggunaan data alternatif dalam proses penilaian kredit. Regulasi tersebut tidak hanya membuka akses pembiayaan formal bagi UMKM mikro tetapi juga memperkuat sistem mitigasi risiko bagi lembaga keuangan.

Selain itu, upaya untuk mengurangi ketimpangan akses kredit perlu dilakukan melalui program penjaminan kredit yang lebih adaptif, dukungan modal kerja berbunga rendah, dan fasilitasi digitalisasi UMKM. Dengan memperkuat kapasitas digital dan administrasi usaha, UMKM mikro dapat meningkatkan kredibilitas dan memperoleh peluang pembiayaan yang lebih proporsional.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2023). *Modul Manajemen Risiko Perbankan*. Departemen Pengawasan Bank.
- Bank Indonesia. (2024). *Statistik Perbankan Indonesia 2020–2024*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik UMKM Indonesia 2023–2024*. Jakarta: BPS RI.
- Djohanputro, B. (2021). *Manajemen Risiko Korporat*. Jakarta: PPM Manajemen.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hull, J. C. (2018). *Risk Management and Financial Institutions* (5th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

- International Monetary Fund. (2024). *Global Economic Outlook 2024: Inflation, Growth, and Financial Stability*. Washington, DC: IMF.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. (atau gunakan yang 2018 sesuai kutipan Anda)
- Kementerian Koperasi dan UMKM. (2024). *Laporan Tahunan Perkembangan UMKM Nasional 2024*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Nasional*. Jakarta: Kemendag RI.
- Kuncoro, M. (2019). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Nurhayati, M., & Wicaksono, A. (2022). Analisis faktor internal dan eksternal terhadap risiko kredit UMKM. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 15(2), 112–126.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Pedoman Analisis Kredit UMKM*. Jakarta: OJK RI.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Perbankan Triwulan IV 2019–2024*. Jakarta: OJK RI.
- Rahmawati, D., & Haryono, S. (2022). Pengaruh pencatatan keuangan terhadap akses pembiayaan UMKM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 55–67.
- Sarwono, J. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Andi Offset.
- Setyawan, B., & Lestari, F. (2021). Pengaruh literasi keuangan terhadap kelayakan kredit UMKM. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 23(3), 221–235.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, T. (2020). Risiko kredit pada sektor UMKM dan implikasi makroekonomi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 24(1), 45–58.
- Tambunan, T. (2020). *Pembangunan UMKM di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- World Bank. (2023). *MSME Finance Gap Report 2023*. Washington, DC: World Bank Group.
- Asian Development Bank. (2023). *Supporting Micro, Small, and Medium Enterprises in Asia*. Manila: ADB.